



PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jl. Pendidikan No. 2 Kota Mataram
bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id
(0370) 750 5330



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024.

Laporan kinerja ini merupakan laporan pertama dari periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Kedepannya, diharapkan penyajian Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025 sehingga target-target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat tercapai.

Akhirnya, diharapkan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja ini, dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat, serta sebagai umpan balik (feed back) untuk perbaikan manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan kepemerintahan yang baik “Good Governance” di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Pelayanan Bakesbangpoldagri	2
1.3. Aspek Strategis.....	3
1.4. Isu Strategis	3
1.5. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi	4
1.6. Kepegawaian	5
1.7. Pengelolaan Aset	6
1.8. Kendala Pelaksanaan Tugas	8
1.9. Sistematika Penyajian	8
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis Pembangunan Daerah.....	9
2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029.....	14
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja.....	19
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	20
3.3 Capaian Kinerja Bakesbangpoldagri Tahun 2024	21
BAB 4 PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran	44

LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Badan Kesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024- 2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan laporan kinerja Badan Kesbangpol tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan Negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (*good governance*)

Seiring dengan upaya merealisasikan terwujudnya kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang demokratis, tenram, aman dan damai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mempedomani visi, misi, tujuan dan sasaran yang secara sistematis telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024-2026. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjawab isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut antara lain penanganan masalah strategis dan kontijensi di daerah, wawasan kebangsaan, pembauran dan ketahanan bangsa, kewaspadaan dini masyarakat, dan kehidupan politik yang demokratis di Nusa Tenggara Barat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri kurun waktu 3 (tiga) tahun (2024-2026) di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami kemajuan dari tahun ke tahun yang ditandai dengan pencapaian target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan. Cakupan potensi konflik sosial yang dapat di cegah dan persentase masyarakat yang mendapat pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah, adalah dua indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB yang cukup menonjol pencapaiannya. Berdasarkan hasil rekapan terakhir Desember 2024, bahwa Persentase keberhasilan deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial sebesar 3,8 % dari target **3,0 %**. Padahal sesungguhnya kalau dilihat dari potensi konflik yang terjadi selama tahun 2024 masih cukup tinggi yaitu mencapai 208 kasus. Akan tetapi kondisi ini cepat terdeteksi dan cepat diambil tindakan pencegahannya sehingga kemunculan potensi konflik sosial yang lebih besar dapat

ditekan. Sampai dengan akhir tahun anggaran, konflik sosial yang terjadi di NTB tercatat ada 8 (delapan) kasus, dimana seluruh dari 8 (delapan Kasus) tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi yang dilakukan bekerjasama dengan mitra kerja Kesbangpoldagri yaitu Bale Mediasi dan mitra kerja lainnya.

Indikator Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah, dengan target 0,75 % realisasi 0,83 % sehingga capaian target yang dicapai adalah sebesar 1,10 %.

Apabila dilihat dari rata-rata capaian, maka capaian indikator kinerja Bakesbangpoldagri relatif masih cukup tinggi yaitu rata-rata capaian 105 %. Capaian Indikator sasaran Eselon II "Persentase keberhasilan deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial" dan Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah, keberhasilan pencapaian sangat didukung oleh capaian indikator Eselon III dibawahnya yang walaupun program dan kegiatannya tidak bisa terlaksana dengan optimal di tahun 2024 dikarenakan penetapan anggaran perubahan di pemerintah daerah dilakukan diakhir Tahun Anggaran. Tetapi karena koordinasi dan komunikasi yang intens dengan seluruh *stakeholder* yang ada di seluruh Kabupaten/Kota sehingga Indikator sasaran bisa tercapai walaupun tidak maksimal. Indikator-indikator yang dimaksud yaitu Cakupan mediasi konflik pada daerah rawan konflik, Persentase penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik. Kolaborasi dan saling bersinerginya program dan kegiatan untuk pencapaian seluruh indikator eselon III ini mengantarkan keberhasilan pencapaian indikator Eselon II diatasnya.

Berdasarkan data dan analisis yang disajikan dalam laporan kinerja ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat merumuskan 2 (dua) tujuan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 yaitu *Pertama* ; Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan masyarakat ; *Kedua* : Terwujudnya kesadaran politik masyarakat;
2. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya sasaran
 - *Pertama adalah* Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan;
 - *Kedua* ; Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat;
3. Berdasarkan hasil analisis terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD), terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaianya melebihi target ($>100\%$) yaitu Persentase Keberhasilan Deteksi Dini & Cegah Dini Potensi Konflik Sosial dengan target 3,0 % dan realisasi 3,8 % dengan capaian target 1,2 % dan Persentase masyarakat yang mendapat Pendidikan Politik pada wilayah dengan tingkat pasrtisipasi politik rendah dengan target 0,10 % dan realisasi 0,134 % dengan tingkat capaian target 134%. Kemudian, terdapat 2 (dua) indikator kinerja untuk Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan indikator Cakupan Potensi Konflik yang dapat dicegah dengan target 100 % dan realisasi 100 %, capaian target 100 % serta indikator Persentase Keterlibatan masyarakat dalam politik dengan target 0,75 % dan realisasi 0,83 %. Pencapaian ini meningkat dari tahun sebelumnya karena didukung oleh adanya pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2024 ini.
4. Rata-rata capaian indikator kinerja 2 (Dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam

dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 sebesar 94,40 %, dengan kata lain capaian indikator kinerja dikategorikan **sangat baik** ($\geq 85\%$).

5. Anggaran program yang menunjang pencapaian 2 (Dua) sasaran strategis dan 2 (Dua) indikator kinerja adalah sebesar Rp. **174.992.246.483**, direalisasikan sebesar **Rp. 173.037.820.936**. (98,8 %) dengan realisasi fisik 100%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (Dua) sasaran strategis terdapat sisa anggaran 1,2 % atau secara absolute sebesar Rp. 1.954.425.547,-.
6. Selanjutnya, guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :
 - a. Meningkatkan komitemen antar Bidang di Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
 - b. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat tercapai.
 - c. Melakukan koordinasi yang intensif serta meningkatkan kolaborasi antar bidang yang berada dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. Optimaliasasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan menggunakan pengembangan IT dan e-Government.

Dengan memahami peluang, potensi dan keunggulan yang dimiliki berdasarkan pengalaman selama ini, maka target-terget kinerja Bakesbangpoldagri pada akhir periode 2024-2026 dapat dicapai meskipun pada tahun 2024 ini masih berlukukat dengan pengetatan anggaran sebagai akibat dari dampak persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada Serentak.

Mataram, Maret 2024
KEPALA BADAN BAKESBANGPOLDAGRIDAGRI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Ruslan Abdul Gani

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651231 199303 1 135

BAB I

PENDAHULUAN

1.9. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB adalah salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terciptanya kondisi daerah yang aman, tenram, harmonis, dan damai melalui peningkatan pemahaman nilai sosial budaya, toleransi masyarakat, dan meningkatnya kesadaran politik masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaran urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi NTB untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Potensi konflik dan kerawanan sosial ancam instabilitas
2. Prevalensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba
3. Optimalisasi implementasi makna wawasan kebangsaan dan bela negara dalam kehidupan masyarakat
4. Optimalisasi peran Ormas dan Parpol dalam pembangunan
5. Ketersediaan sumberdaya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

kesbangpol

Untuk menjawab isu-isu dimaksud pada dasarnya di TA. 2024 telah ditindaklanjuti dengan beberapa program dan kegiatan.

Beberapa program dan kegiatan dimaksud antara lain :

1. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN, Implementasi dari Program ini dimaksudkan untuk menjawab dan menindaklanjuti Isu Strategis No (3) yaitu Optimalisasi implementasi makna wawasan kebangsaan dan bela negara dalam kehidupan masyarakat
2. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK. Implementasi dari Program ini dimaksudkan untuk menjawab isu strategis No. (4) yaitu Optimalisasi peran Ormas dan Parpol dalam pembangunan.
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Implementasi dari Program ini dimaksudkan untuk menjawab isu strategis No. (4) yaitu Optimalisasi peran Ormas dan Parpol dalam pembangunan
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Implementasi dari Program ini dimaksudkan untuk menjawab isu strategis No. (2) yaitu Prevalensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba
5. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Implementasi dari Program ini dimaksudkan untuk menjawab isu strategis No. (1) yaitu Potensi konflik dan kerawanan sosial ancam instabilitas

Walaupun secara keseluruhan program dan kegiatan tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan maksimal, akan tetapi karena koordinasi yang intensif baik dengan OPD dan Instansi terkait di lintas Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan juga dukungan semakin tingginya tingkat kepedulian masyarakat akan pentingnya hidup rukun dan damai dalam berbangsa dan bernegara, sehingga mampu menghantarkan kondisi masyarakat NTB tidak semakin terpuruk pada kondisi Pandemi tersebut.

1.9. Gambaran Umum Pelayanan Bakesbangpoldagri

1.2.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pergub NTB No. 49 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah provinsi.

1.2.2. Fungsi.

Bakesbangpoldagri Provinsi NTB melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

1.9. Aspek Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memelihara stabilitas politik dalam negeri. Aspek strategis yang menjadi fokus utama Bakesbangpoldagri meliputi:

1. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama: Bakesbangpoldagri berperan dalam memfasilitasi dialog antar umat beragama untuk menciptakan kerukunan dan mencegah konflik berbasis SARA.
2. Pengembangan Wawasan Kebangsaan: Melalui program pendidikan dan sosialisasi, Bakesbangpoldagri berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan, sehingga tercipta masyarakat yang berwawasan luas dan nasionalis.
3. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat: Bakesbangpoldagri bertugas meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pendidikan politik, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam proses demokrasi.
4. Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Keagamaan: Dengan memperhatikan aspek kemajemukan masyarakat, Bakesbangpoldagri berupaya menjaga stabilitas dan ketahanan di berbagai bidang untuk mencegah potensi konflik.
5. Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan: Bakesbangpoldagri melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan untuk memastikan peran serta mereka dalam pembangunan berjalan sesuai dengan peraturan dan mendukung stabilitas nasional.

Dengan menjalankan aspek-aspek strategis tersebut, Bakesbangpoldagri berkontribusi signifikan dalam menciptakan kondisi masyarakat yang harmonis, stabil, dan demokratis.

1.9. Isu Strategis

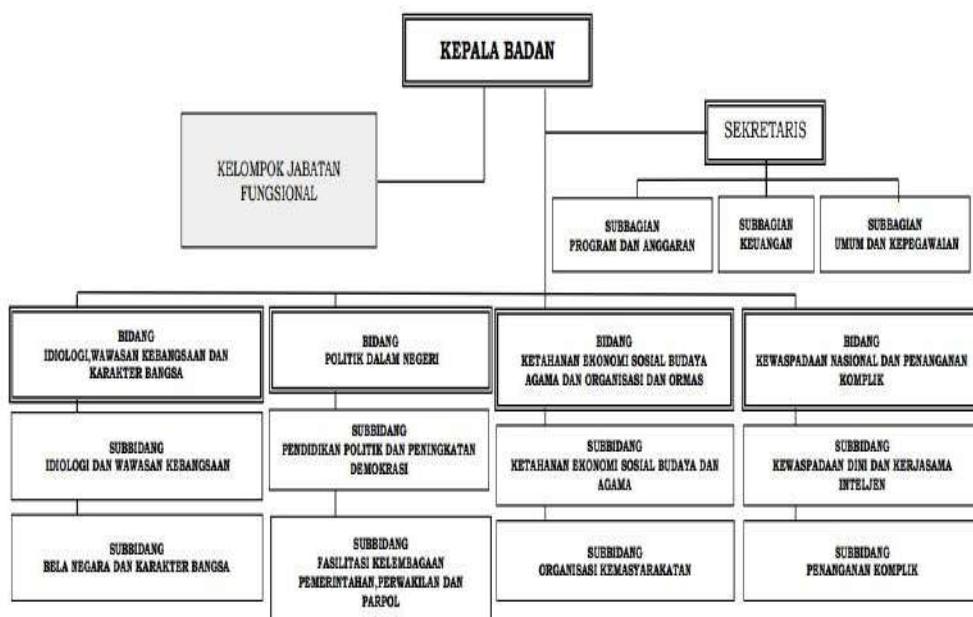
Adapun beberapa isu strategis yang menjadi tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain:

1. Potensi konflik dan kerawanan sosial masih marak terjadi dalam masyarakat
2. Prevalensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih cukup tinggi
3. Mulai terkikisnya rasa nasionalisme dan krisis kebangsaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa;
4. Partisipasi aktif Ormas/LSM dan partai politik dalam pembangunan;
5. Ketersediaan sumberdaya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kesbangpol
6. Penyediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan secara berkesinambungan.

1.9. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi

Untuk menunjang Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dalam kegiatan pembangunan maka penataan susunan organisasi berdasarkan Berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pergub NTB No. 49 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019. Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah "Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi". Bakesbangpoldagri Provinsi NTB melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

Gambar 1-1 Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB



Keterangan:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiyan.
3. Bidang Idiologi,Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.
 - b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
4. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi.
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parpol.
5. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama.
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
6. Bidang Pengawasan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteljen.
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sampai saat ini jabatan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya terdapat 2 (Dua) orang fungsional tertentu pertama (Pranata Komputer).

1.7. Kepegawaian

Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB terhitung sampai 31 Desember 2021 berjumlah 47 orang. Kondisi kepegawaian ditinjau dari beberapa segi yaitu segi pendidikan, kepangkatan, golongan dan jabatan.

1.6.1. Tingkat Pendidikan

Kondisi kepegawaian berdasarkan tingkat Pendidikan dapat diuraikan berdasarkan Table 1.1 dibawah ini.

NO.	Uraian	Tahun 2018 (Orang)	Tahun 2019 (Orang)	Tahun 2020 (Orang)	Tahun 2021 (Orang)
1.	Pendidikan Doktoral / S-3	0	0	0	0
2.	Pendidikan Pasca Sarjana / S-2	6	4	4	2
3.	Pendidikan Saraja / S-1	27	27	29	29
4.	Pendidikan Diploma / D.IV	0	0	0	0
5.	Pendidikan Diploma / D.III	0	0	0	0
6.	Pendidikan Diploma / D.I	0	0	0	0
7.	Pendidikan SMK	0	0	4	4
8.	Pendidikan SMA	17	16	12	11
9.	Pendidikan SMPK	0	0	0	0
10.	Pendidikan SMP	0	0	0	0
11.	SD	2	2	2	1
12.	Jumlah	52	49	50	47

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari total pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB sebanyak 47 orang didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S1 yakni sebanyak 29 orang (61,70%), SMA 11 orang (23,40%), SMK 4 orang (8,51%) kemudian disusul dengan pegawai dengan Pendidikan S2 sebanyak 2 orang (4,26%) dan SD sebanyak 1 orang (2,13%). Apabila dilihat dari persentase tingkat Pendidikan maka keberadaan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB sudah menunjukkan tingkat pengetahuan teknis dan keterampilan yang memadai.

1.6.2. Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai Bada Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB berdasarkan pangkat dan golongan sampai dengan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB dirinci berdasarkan pangkat dan golongan

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	0	0	1
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	2	0	0
3.	Pembina Tk.I (IV/b)	4	5	2	3
4.	Pembina (IV/a)	2	1	2	3
5.	Penata Tk.I (III/d)	12	12	17	13
6.	Penata (III/c)	3	5	7	6
7.	Penata Muda Tk.I (III/b)	6	2	1	2
8.	Penata Muda (III/a)	6	6	9	4
9.	Pengatur Tk.I (II/d)	1	4	0	7
10.	Pengatur (II/c)	6	6	6	6
11.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	6	4	4	1
12.	Pengatur Muda (II/a)	3	1	1	0
13.	Juru Tk.I (I/d)	0	0	0	0
14.	Juru (I/c)	1	1	1	0
15.	Juru MudaTk.I (I/b)	0	0	0	0
16.	Juru Muda (I/a)	0	0	0	1
	Jumlah	52	49	51	47

Dari Tabel 1.2 di atas terlihat bahwa kondisi kepangkatan dan golongan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB tahun 2024 dan di dominasi oleh golongan III/d. Dari segi kepangkatan terlihat bahwa sebagian besar pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB ada pada Golongan III.

1.6.3. Jabatan

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB berdasarkan eselonisasi dan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3 Jumlah pegawai Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dirinci berdasarkan jabatan

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	Eselon II	1	1	0	1
2.	Eselon III	3	4	5	1
3.	Eselon IV	8	9	9	11
4.	Jabatan Fungsional Umum	36	31	34	32
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	4	4	3	2
	Jumlah	52	49	51	47

1.7. Pengelolaan Aset

Daftar Asset pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB yang tercatat di Tahun 2024 dapat dilihat pada table 1.4. dibawah ini:

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
I.	PRASARANA				
1.	Tanah Bangunan	1	1	-	-
2.	Bangunan Gedung Kantor	1	1	-	-
II.	SARANA				
1.	Station Wagon	1	-	-	1
2.	Mini Bus	7	7	-	-
3.	Pick Up	1	1	-	-
4.	Sepeda Motor	29	22	1	6
5.	Sepeda	2	-	-	2
6.	Mesin Ketik Manual	3	1	2	-
7.	Mesin Absen	1	1	-	-
8.	Rak Kayu	14	10	4	-
9.	Filling Besi	5	2	3	-
10.	Filling Kayu	8	-	8	-
11.	Brand Kas	4	4	-	-
12.	Lemari Kayu	9	6	3	-
13.	Papan Pengumuman	14	14	-	-
14.	White Board	2	2	-	-
15.	Display	2	1	1	-
16.	Meja Rapat	18	18	-	-
17.	Meja Telpon	3	3	-	-
18.	Meja Tik	1	1	-	-
19.	Kursi Tamu	2	2	-	-
20.	Kursi Tangan	11	8	3	-
21.	Kursi Putar	5	2	3	-
22.	Kursi Biasa	26	16	10	-
23.	Bangku Tunggu	1	1	-	-
24.	Kursi Lipat	125	122	3	-
25.	Meja Biro	1	1	-	-
26.	Jam Elektronik	6	6	-	-
27.	Mesin Penghisap Debu	1	1	-	-
28.	Mesin Pemotong Rumput	1	1	-	-
29.	Lemari Es	2	2	-	-
30.	AC Unit	15	15	-	-
31.	Kipas Angin	3	3	-	-
32.	Radio	1	-	1	-
33.	Televisi	5	5	-	-
34.	Mic Wireless	1	1	-	-
35.	Camera Video	1	1	-	-
36.	Lambang Garuda Pancasila	2	2	-	-
37.	Tangga Aluminium	1	1	-	-
38.	Kaca Hias	2	2	-	-
39.	Dispenser	4	4	-	-
40.	Mimbar/ Podium	1	-	1	-
41.	Handy Cam	4	4	-	-
42.	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	2	2	-	-
43.	PC Unit	4	4	-	-
44.	Laptop	5	4	1	-
45.	Note Book	5	4	1	-
46.	Personal Komputer Lain-lain	9	9	-	-
47.	CPU	1	-	1	-

48.	Perlatan Komputer Mainframe Lain-Lain	4	4	-	-
49.	Printer	16	15	1	-
50.	UPS	1	-	1	-
51.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	57	49	8	
52.	Meja Tamu Ruangan Biasa	6	5	1	-
53.	Buffet Kayu	2	-	2	-
54.	Camera	5	5	-	-
55.	Microphone Floor Stand	4	1	3	-
56.	UPS	1	1	-	-
57.	Sound System	1	1	-	-
58.	Pesawat Telephone	2	2	-	-
59.	Handy Talky	3	3	-	-
60.	Faximilie	1	1	-	-
61.	Gambar Presiden	2	2	-	-
62.	Gambar Wakil Presiden	2	2	-	-

Tabel 1.4 Daftar Sarana dan Prasarana Bakesbangpoldagri Tahun 2024.

1.9. Kendala Pelaksanaan Tugas

Bakesbangpoldagri Provinsi NTB merupakan salah satu OPD yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah dan sebagai mata dan telinganya Pemerintah memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan mempertahankan kondusifitas daerah guna keberlangsungan pembangunan di segala sektor. Oleh karena itu harus di tunjang dengan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai.

Meskipun target indikator kinerja dapat dicapai, namun tidak berarti lepas dari berbagai kendala atau permasalahan. Kendala yang cukup dirasakan adalah masih minimnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Bakesbangpoldagri Provinsi NTB baik dari secara kuantitas maupun kualitas. Secara kualitas sebagian besar para pejabat struktural yang ditempatkan pada Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, tidak didasarkan pada pertimbangan latar belakang pendidikan dan pengalaman, jabatan yang berkesesuaian dengan kompetensi yang diperlukan pada jabatan serta minimnya aparat yang mengikuti diklat teknis yang diperlukan seperti diklat intelejen. Sedangkan secara kuantitas jumlah PNS yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan tupoksi pada Bakesbangpoldagri sebanyak 58 orang, namun yang tersedia hanya 47 orang.

1.9. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini menunjukkan pencapaian kinerja Bakesbangpoldagri Provinsi NTB selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*peformance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian LKjIP tahun 2024 ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas penjelasan umum tentang tugas pokok dan fungsi organisasi dalam hal ini Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dengan penekanan pada aspek strategi organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi dalam kurun waktu Tahun 2021.

BAB II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja

Bakesbangpoldagri Provinsi NTB untuk Tahun 2024.

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menguraikan tentang:

- A. Capaian Kinerja Organisasi, menjelaskan capaian kinerja Bakesbangpoldagri Provinsi NTB untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerjanya.
- B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Bakesbangpoldagri Provinsi NTB sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh atas capaian kinerja Bakesbangpoldagri Provinsi NTB serta langkah di masa mendatang yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Daerah

Tahun 2023 Provinsi NTB termasuk salah satu provinsi yang masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernurnya berakhir pada tanggal 19 September 2023. Oleh karena itu, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru; Pemerintah Provinsi NTB berkewajiban menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi yang disusun karena RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 berakhir masa pelaksanaannya pada tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 akan berlangsung Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional, sehingga setelah tanggal 19 September 2023 Provinsi NTB akan dipimpin oleh Penjabat Gubernur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional. Dengan demikian RPD Provinsi NTB Tahun 2024- 2026 menjadi pedoman dalam mengarahkan dan melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2024-2026.

Oleh karena itu dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpoldagri Provinsi NTB untuk menyesuaikan indikator dan target Rencana Pembangunan Daerah (2024-2026).

2.1.1. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama – sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 - 2026.

2.1.2. Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Namun pada

periode ini, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi NTB merumuskan konsep RPD 2024- 2026 sebagai acuan setiap OPD dalam menyusun Renstra dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

1. 5 Misi RPJPD Provinsi NTB 2005-2025
2. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024
3. 6 Misi RPJMD Provinsi NTB 2018-2023
4. 7 Isu-isu strategis 2024-2026
5. Isu global, regional, dan lokal yang berkembang di daerah

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan yang mengacu pada berbagai dokumen perencanaan tersebut serta berbagai isu aktual yang dihadapi teridentifikasi 6 dimensi pembangunan yang menjadi isu utama yang perlu diatasi dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024-2026. Dengan demikian fokus perencanaan pembangunan daerah pada periode 2024-2026 terdiri atas 3 pilar utama dan 3 pilar pendukung. Tiga pilar utama yaitu dimensi pembangunan manusia (People), dimensi pembangunan lingkungan (Planet) dan Dimensi Pembangunan kesejahteraan (Prosperity). Selanjutnya tiga pilar pendukung meliputi dimensi tata kelola (governance), dimensi pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan dimensi daya saing daerah (Competitiveness). Keenam dimensi tersebut menjadi dasar perumusan kerangka logis RPD ini yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah Provinsi NTB tahun 2024-2026.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dalam mendukung pencapaian tujuan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 maka telah ditetapkan fokus perencanaan pembangunan yang diemban Bakesbangpoldagri Provinsi NTB adalah pada Dimensi ke-3 yaitu "Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri.

Tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Pilar 3 Prosperity dengan Tujuan dan Sasaran :

A. Tujuan :

1. Terwujudnya kualitas demokrasi di Nusa Tenggara Barat
2. Terwujudnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan.

B. Sasaran :

1. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat.
2. Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bakesbangpoldagri Provinsi NTB.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan dalam RPD 2024 – 2026 , dimana Bakesbangpoldagri Provinsi NTB mengemban tugas untuk mendukung pilar ke-3 Prosperity serta mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Bakesbangpoldagri Provinsi NTB tahun 2024 – 2026 sesuai dengan bidang kesatuan bangsa yaitu:

1. Terwujudnya kesadaran politik masyarakat.
2. Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Sedangkan sasaran yang ingin di capai Bakesbangpoldagri Provinsi NTB tahun 2024 – 2026 dan merupakan penjabaran dari tujuan itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat.
2. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Adapun tujuan, sasaran, serta target indicator kinerja yang ingin di capai Bakesbangpoldagri Provinsi NTB tahun 2024 – 2026 tersaji pada tabel 2-1.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bakesbangpoldagri Provinsi NTB

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun (%)				Formula
				2024	2025	2026		
1.	Terwujudnya pemahaman nilai sosial, budaya dan toleransi masyarakat.	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan potensi konflik yang dapat dicegah	3,00	3,50	4.00		(Jumlah potensi konflik yang dapat dicegah / jumlah potensi konflik) x 100
			Presentase keberhasilan deteksi dini & cegah dini potensi konflik sosial	100	100	100		(Konflik Sosial - Konflik yang muncul Kembali / Konflik Sosial) x 100%
2.	Terwujudnya kesadaran politik masyarakat	Meningkatnya masyarakat sadar politik	Persentase keterlibatan masyarakat dalam politik	0,75	0,80	0,85		(Jumlah masyarakat yang terlibat dalam Organisasi Politik + Ormas / Jumlah masyarakat usia 20-59 tahun) x 100%
			Persentase masyarakat yang mendapat Pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	1,8	2.0	2.0		(Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pendidikan politik / Jumlah masyarakat yang memiliki hak pilih) x 100

2.1.4. Program dan Kegiatan

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas Misi enam RPJMD 2019-2023 yaitu " Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan". Sasaran dari misi tersebut adalah Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat dan Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menjadi program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

1..1.1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan;
- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.

1..1.2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Partai Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah;
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah;
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah;

1..1.3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya

- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial

Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

1..1.4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

1..1.5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan dini, Kerja sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kelembagaan serta Penanganan Konflik di daerah;
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan dini, Kerja sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kelembagaan serta Penanganan Konflik di daerah;
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kewaspadaan dini, Kerja sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kelembagaan serta Penanganan Konflik di daerah;
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dalam Rencanaan Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 telah ditetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Pendidikan Politik Dalam Negeri Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target (%)
1.	Terwujudnya pemahaman nilai sosial, budaya dan toleransi masyarakat.	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penanganan Konflik SARA	100
			Persentase Kelompok Masyarakat Yang mengikuti Pendidikan Karakter Bangsa	25
			Cakupan Mediator Bale Mediasi Yang dilatih	5,11
2.	Terwujudnya kesadaran politik masyarakat	Meningkatnya masyarakat sadar politik	Indeks Demokrasi	77,47

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Daerah pada RPD Provinsi NTB 2024-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun										Formula	
			2024		2025		2026							
			Target	Realisasi	Tar-	Realisasi	Target	Realisa-	Tar-	Realisasi	Targ-	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Partisipasi Politik Masyarakat	84,57	84,57	84,85	82,85		83,74						Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih/ Jumlah DPT x 100%	
2.	Percentase Kelompok Masyarakat Yang mengikuti Pendidikan Karakter Bangsa	0,10	0,10	0,13	0,11	-	0,12	-					Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Karakter Bangsa/Jumlah Kelompok Masyarakat X 100	
3	Percentase penurunan konflik sosial	100	100	100	100		100						(jumlah konflik yang terjadi sebelumnya – jumlah konflik tahun ini / jumlah konflik tahun sebelumnya) * 100	
4	Percentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	0,74	0,75	-	0,80		0,85						(jumlah masyarakat yang terlibat dalam kepengurusan Parpol + Ormas / jumlah masyarakat usia 25 – 59 thn) * 100	
5	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih (%)	5	5,11	5,10	5,33	-	5,55	-					(jumlah mediator yg dilatih tahun N/jumlah mediator di desa tahun N - total mediator yang sudah dilatih tahun sebelumnya) * 100	

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kesadaran Politik masyarakat	Persentase keterlibatan masyarakat dalam politik	0,75%
2.	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase keberhasilan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial	3,0%

Dari perjanjian inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh Aparatur Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dari level eselon II hingga ke staf yang disesuaikan dengan masing-masing tugas dan fungsi yang diembannya.

Tabel 2.5 Anggaran Program Kegiatan Bakesbangpoldagri Provinsi NTB Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp.)
1.	Program Ideologi Penguatan Pancasila dan Karakter Kebangsaan	750.305.412,-
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	160.007.024.455,-
3.	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1.767.314.000,-
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial Budaya	707.740.000,-
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial	3.910.560.000,-

Pada tabel 2.5 menggambarkan pagu anggaran untuk membiayai program kegiatan Bakesbangpoldagri tahun anggaran 2024. Kondisi pada tahun 2024 sedikit

lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023 dimana ditahun itu masih merupakan masa atau tahap pemulihan dari pandemi Covid-19 yang mewabah sejak 2020 yang lalu sehingga Pemerintah Daerah mengambil kebijakan *Refocusing* anggaran untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Tabel 2.6 Anggaran Sasaran Strategis Bakesbangpoldagri Provinsi NTB
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)
1.	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	5.368.605.412,-
2.	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	161.774.338.455,-
J U M L A H		167.142.943.867,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran hasil atau tingkat keberhasilan individu secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Pada laporan kinerja ini, pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Ada dua jenis pengukuran capaian kinerja yang dapat digunakan yaitu :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
 Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja
 Tahun 2024

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis. Dari 2 (Dua) Tujuan dan 2 (Dua) sasaran strategis tersebut, ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja sebanyak 4 (Empat) indikator kinerja.

Hasil pengukuran kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja 2 (dua) tujuan Tahun 2024 adalah sebesar **105 %** dengan rincian :

- 1. Cakupan Potensi Konflik yang dapat Dicegah** target 100 % dengan realisasi 100 % dan capaian 100 %. Angka tersebut didapat dari jumlah kasus yang terjadi sepanjang tahun 2024 sebanyak 798 kasus. Dari 798 kasus tersebut yang berpotensi muncul menjadi konflik adalah sebanyak 208 kasus. Namun dengan upaya yang maksimal melalui berbagai kegiatan yang ada di Bakesbangpoldagri seperti kegiatan penyusunan dan deteksi dini dan cegah dini potensi konflik, jumlah potensi-potensi konflik tersebut dapat ditekan meskipun kemudian ada 8 kasus yang muncul sebagai konflik. Dan Konflik Sosial yang muncul ke permukaan sebanyak 8 kasus tersebut kesemuanya dapat diselesaikan melalui mediasi oleh Bale mediasi bekerja sama dengan mitra kerja Bakesbangpoldagri lainnya.
- 2. Persentase keterlibatan masyarakat dalam politik** target 0,75 % realisasi 0,83 % dengan capaian 110 %. Angka tersebut didapat dari 18.598 orang masyarakat NTB yang terlibat langsung dalam Kepengurusan Organisasi atau sebesar 0,83% dari 2,250.759 jiwa penduduk NTB usia 25 – 59 tahun sebagaimana disajikan pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tujuan Badan Kesbangpoldagri NTB Tahun 202

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya pemahaman nilai sosial budaya dan toleransi masyarakat	Persentase Potensi Konflik yang dapat dicegah	98,86 %	66 %	88 %
2.	Terwujudnya kesadaran politik masyarakat	Persentase keterlibatan masyarakat dalam politik	1.0 %	1,26 %	126 %

Adapun rata-rata capaian target indikator kinerja 2 (Dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 adalah **126 %**. Dari 2 (Dua) indikator kinerja, capaiannya melebihi target yaitu persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah sebesar 0,83 %. Hasil pengukuran kinerja pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis dimaksud disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Badan Kesbangpoldagri NTB Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase keberhasilan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial	3,0 %	3,0 %	100 %
2.	Meningkatnya masyarakat sadar politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah	0,75 %	0,83 %	105 %

Pada tabel di atas, hasil pengukuran kinerja untuk capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yaitu Dua sasaran strategis berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan kategori nilai "**Sangat Baik**" dengan nilai 100 % untuk sasaran 1,05 % untuk sasaran 2.

Capaian yang diperoleh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat ini harus dipertahankan dan bahkan harus terus ditingkatkan dengan melakukan berbagai inovasi dan langkah-langkah konkret untuk terus menjamin kondisi aman dan nyaman di wilayah Nusa Tenggara Barat.

3.3 CAPAIAN KINERJA BADAN KESBANGPOLDAGRI TAHUN 2024

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang

diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Berikut ini dapat dijelaskan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja per sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

3.3.1 Sasaran Strategis I: Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Indonesia pada umumnya dan Nusa Tenggara Barat khususnya, memiliki keanekaragaman baik dilihat dari suku bangsa, ras, bahasa, agama dan adat istiadat. Keanekaragaman tersebut pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesajahteraan masyarakat. Pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat di daerah, jika ada ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial-ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali. Dinamika sosial yang diiringi oleh konflik dengan kekerasan berlangsung dalam beraneka rupa bentuk dan menyebar hampir di segala aspek kehidupan masyarakat, akibatnya akan selalu sama yaitu mengganggu integrasi sosial. Konflik tersebut telah mengakibatkan terganggunya rasa aman sehingga menimbulkan rasa takut masyarakat, terjadinya kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan bahkan korban jiwa dan trauma psikologis pada gilirannya dapat menghambat usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk merubah image bahwa wilayah Provinsi NTB yang tidak kondusif dan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara mendapatkan rasa aman dan nyaman, maka Bakesbangpoldagri Provinsi NTB menetapkan "**Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan**" sebagai salah satu **sasaran** yang ingin dicapai dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan di segala bidang kehidupan. Dan untuk mengukur pencapaian Sasaran tersebut dapat dilihat pada pencapaian indikator sebagai berikut :

Persentase keberhasilan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial

Untuk mengukur Persentase keberhasilan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{konflik sosial} - \sum \text{konflik sosial yang muncul kembali}}{\sum \text{konflik sosial}} \times 100\%$$

Persentase keberhasilan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial, merupakan suatu parameter yang menggambarkan kemampuan menggagalkan atau meredam gejolak dalam masyarakat melalui upaya mengetahui lebih awal permasalahan dalam masyarakat guna ditetapkan langkah pencegahan yang tepat supaya tidak menimbulkan konflik sosial yang lebih besar.

Penekanan dari indikator Persentase keberhasilan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial yang dimaksud disini yaitu keberhasilan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial yang sudah terjadi untuk tidak muncul kembali menjadi konflik sosial baru pada tahun yang sama atau tahun berjalan.

Beberapa istilah terkait formulasi indikator tersebut :

1. **Deteksi dini dan cegah dini** merupakan salah satu paket kinerja kunci dalam menangkal ataupun menggagalkan timbulnya konflik sosial di masyarakat. Langkah ini sangat diperlukan untuk mengetahui lebih awal berbagai potensi yang bisa menimbulkan kerawanan, gangguan dan bahaya yang sewaktu-waktu meledak dalam segala bentuk yang mengganggu keamanan sosial, politik, persatuan dan kesatuan. Pentingnya deteksi dini supaya lebih awal mengetahui permasalahan di dalam masyarakat yang bisa melahirkan gejolak, supaya bisa diambil tindakan yang tepat untuk mencegahnya.

2. Konflik sosial

Konflik sosial yang dimaksud dalam uraian ini adalah konflik sosial sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yaitu Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang berdampak luas dan mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas Nasional dan menghambat pembangunan Nasional.

3. Potensi Konflik Sosial

Potensi Konflik Sosial adalah segala bentuk permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang dapat menimbulkan gejolak, mengganggu keamanan, sosial, politik, persatuan dan kesatuan. Potensi konflik apabila tidak dilakukan pencegahan dan penanganan yang tepat akan melahirkan konflik sosial yang lebih besar.

4. Konflik Sosial yang muncul kembali

Konflik Sosial yang muncul kembali adalah konflik sosial yang sudah dilakukan penanganan secara sistematis pada saat terjadinya konflik maupun pasca konflik namun dalam kurun waktu tahun berjalan kembali meledak dan muncul sebagai konflik sosial.

Tabel 3.4 Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Tingkat Capaian
Persentase keberhasilan cegah dini dan deteksi dini konflik sosial	3,0 %	3,04 %	100 %

Dari Tabel 3.3 diatas menunjukkan bahwa dari target 3,0 % dan Realisasi 3,04 % tingkat pencapaian mencapai 100 %. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori **"sangat baik"**.

Selanjutnya, perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Konflik di NTB Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dapat dijelaskan pada tabel 3. berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Renstra Bakesbangpoldagri 2024 – 2026

No.	Indikator kinerja	Tahun 2023 (%)		% capai an	Tahun 2024 (%)		% capai an	Tahun 2025 (%)		% Capai an	Tahun 2026 (%)	
		Target	Realis asi		Targ et	Realis asi		Tar get	Real isasi		Targ et	Realis asi

1	Percentase keberhasilan cegah dini dan deteksi dini konflik sosial	3,00	3,00	100	3,00	3,04	101	3,5				4,0
---	--	------	------	-----	------	------	-----	-----	--	--	--	-----

Memperhatikan realisasi capaian tahun 2024 yang berada diposisi 3,04 % jika dibandingkan dengan target untuk tahun 2024 sebesar 3,00 maka capaian kinerja Bakesbangpoldagri tahun 2024 adalah sebesar 101%. Ini artinya bahwa pencapaian tahun 2024 meskipun berada pada tahun politik yang memungkinkan terjadinya peningkatan potensi konflik namun capaian yang diperoleh melalui berbagai program dan kegiatan yang ada di Bakesbangpoldagri terjadi peningkatan sebesar 0,04%. Hal ini tentunya didukung oleh stakeholder dan Mitra kerja Bakesbangpoldagri dalam melakukan antisipasi dan deteksi dini konflik sosial, sehingga potensi konflik yang mungkin terjadi di masyarakat dapat diminimalisir seminimal mungkin dan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada 2024 dapat terlaksana dengan sukses, aman dan kondusif.

Dengan memperhatikan tingkat capaian kinerja pada situasi politik seperti tahun 2024, pencapaian target 101% Bakesbangpoldagri semakin optimis dapat menjaga kondisifitas stabilitas wilayah pada tahun – tahun berikutnya dengan baik. Optimisme ini didukung oleh semakin meningkatnya kedewasaan dan kematangan masyarakat dalam menerima perbedaan politik dan ideologi sehingga target akhir periodesasi Renstra Bakesbangpoldagri 2024 - 2026 optimis akan dapat tercapai.

Pada tahun 2024 potensi konflik sosial yang terjadi di NTB adalah sebanyak 271 kasus. Kondisi ini lebih rendah dibandingkan dengan total potensi konflik sosial yang terjadi pada tahun 2023 sebanyak 798 kasus atau turun sebanyak 527 kasus (66,0%). Penurunan sebesar 66% ini didominasi oleh kasus ekonomi dan sosial. Potensi konflik yang terjadi di NTB selain di picu oleh kejadian menonjol seperti tindak kriminal, perkelahian juga dibentuk dari kejadian unruk rasa. Berikut disajikan beberapa potensi konflik atau kasus menonjol yang berpotensi konflik di wilayah NTB.

Tabel 3.6 Potensi Konflik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

NO	JENIS KASUS	KABUPATEN / KOTA										JUMLAH
		Kota Mataram	Kab. Lombok Utara	Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Timur	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Sumbawa	Kab. Dompu	Kab. Bima	Kota Bima	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	5
1	PENGHADANGAN/BLOKIR/SEGEL			1	1	2	2	9	15	60	2	92
2	PENGANIAYAAN / PEMBACOKAN			3	2	1		26	2	27	14	75
3	PERKELAHIAN WARGA/KAMPUNG	1						1		1	1	4
4	PERKELAHIAN PEMUDA				1			3	1	4	9	18

5	PERKELAHIAN PELAJAR								2	1	3		
6	PEMANAHAN						2		1	5	8		
7	PEMBUNUHAN	1					1		3		5		
8	ASUSILA/PEMERKOSAAN/PENCABULAN						17		4	4	25		
9	PENGERUSAKAN				1		8		5	2	16		
10	PEMBAKARAN							1	1		2		
11	PENYERANGAN							1	1		2		
12	SENGKETA LAHAN			1			1		2		4		
13	KERIBUTAN		1		1		2			4	8		
14	PENOLAKAN PEMBANGUNAN			1						1	2		
15	KONSENTRASI MASSA				2				1	2	5		
16	PENGUASAAN LAHAN										0		
17	PROVOKASI										0		
18	UJARAN KEBENCIAN										0		
19	KECALAKAAN LALU LINTAS										0		
20	MOGOK KERJA										0		
21	PENISTAAN AGAMA										0		
22	PENEMBAKAN	1									1		
23	ISU DUKUN SANTET									1	1		
TOTAL			3	0	5	6	7	2	70	20	112	46	271

Tabel 3.7 Jumlah Kasus di Provinsi NTB Tahun 2024 berdasarkan Latar Belakang Konflik.

NO	KABUPATEN/KOTA	LATAR BELAKANG					JUMLAH LAPORAN IPOLEKSOSBUD HANKAM
		IDEOLOGI	POLITIK, HUKUM DAN PEMERINTAHAN	EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA	HANKAM	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KOTA MATARAM	1	359	86	82	12	540
2	KABUPATEN LOMBOK UTARA	0	115	19	42	2	178
3	KABUPATEN LOMBOK BARAT	1	158	66	56	11	292
4	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	0	312	79	84	14	489
5	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	0	143	29	50	3	225
6	KABUPATEN	5	171	25	56	9	266

	SUMBAWA BARAT						
7	KABUPATEN SUMBAWA	0	291	109	217	73	690
8	KABUPATEN DOMPU	3	118	65	29	23	238
9	KABUPATEN BIMA	11	262	70	96	140	579
10	KOTA BIMA	11	413	274	133	47	878
JUMLAH		32	2342	822	845	334	4375

Sumber : Komunitas Jejaring Kab/Kota se-NTB

Dari table 3.7 diatas menunjukan bahwa jumlah kasus yang terjadi di Provinsi NTB sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 4375 dan yang berpotensi menjadi konflik sebanyak 271 kasus. Dari 271 kasus konflik yang muncul di lapangan ada 263 kasus dapat diselesaikan ditingkat lapangan berkat kesigapan Tim Jejaring yang tersebar di semua wilayah Kabupaten/Kota melalui Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi Konflik, sementara 8 kasus konflik lainnya diselesaikan melalui mediasi yang dilakukan oleh Bale Mediasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian target Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi Konflik telah melewati target yang ditetapkan sebesar 0,04% dan demikian juga dengan tingkat capaian jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023.

Secara keseluruhan kasus konflik sosial yang terjadi pada 2024 tersebut terjadi hampir merata di seluruh kabupaten/Kota di wilayah NTB dan didominasi oleh kasus yang terkait dengan hukum dan pemerintahan sebanyak 2.342 kasus dari 4.375 kasus yang terjadi sepanjang 2024. Untuk kasus dengan latar belakang ekonomi dan pembangunan adalah sebesar 274 kasus dari 4.375 kasus atau sebesar atau sebesar 6,26%. Untuk kasus dengan latar belakang sosial budaya adalah sebesar 133 kasus atau 3,04% dari 4.375 kasus.

Jika dilihat dari capaian kinerja yang terus meningkat dibandingkan dengan tahun sebelum – sebelumnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat potensi konflik di masyarakat masih cukup tinggi. Untuk mengantisipasi hal ini, maka pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berupaya mengintensifkan peran tim dan forum-forum strategis daerah diantaranya, Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Tim Koordinasi Pembinaan dan Penanggulangan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Bale Mediasi, dan Jejaring semaksimal mungkin ditengah keterbatasan anggaran yang ada.

Sepanjang tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan rapat tim rapat Timdu PKS sebanyak 2 kali rapat, rapat tim FKUB sebanyak 1 kali rapat, rapat tim FPK sebanyak 2 kali rapat dan rapat Forkopimda sebanyak 12 kali rapat. Tim dan forum-forum strategis ini dibentuk melalui Keputusan Kepala Daerah dan difasilitasi pembentukannya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peran dari tim dan forum-forum strategis ini diantaranya :

1. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah
2. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini
3. Mengkoordinasikan langkah-langkah pengamanan terhadap kondisi-kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketenetrman dan ketertiban di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

4. Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
5. Memberikan laporan informasi serta rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan dalam pengambilan keputusan.

Beberapa hal yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase keberhasilan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial adalah sebagai berikut.

a. Efektifnya Pemanfaatan Sumber Daya

Yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan saling bersinergi antar bidang untuk menghasilkan pencapaian target yang maksimal melalui:

- 1) Saling keterkaitan dan saling mendukungnya antara indikator, baik antara indikator eselon II dengan eselon 3, demikian juga antara eselon III dengan eselon IV dibawahnya, sehingga indikator outcome Perangkat Daerah (Eselon II) terdongkrak dengan baik.

Indikator-indikator Eselon III dimaksud yaitu :

- Cakupan Mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik;
- Persentase Pembinaan Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada daerah Rawan Konflik;
- Persentase Desa Bersinar.

- 2) Saling bersinergi dan efektifnya program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang-bidang Teknis, yang walaupun dilihat dari sisi anggaran karena pandemic Covid-19 sangat minim dan tidak mendukung, tetapi karena substansi kegiatan bisa saling mengisi satu sama lain maka capaian outcome dari masing-masing program tidak berpengaruh secara signifikan dengan keterbatasan capaian output.

Beberapa Program dan kegiatan yang dimaksud yaitu :

- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik, dengan memfungsi seluruh perangkat-perangkat kegiatan yang ada didalamnya. Sehingga indikator program berupa Cakupan Mediasi pada daerah rawan konflik dengan target 10% realisasi 10% dengan capaian target 100%. Pelaksanaan Kegiatannya berupa hibah kepada Lembaga yang difasilitasi, Honorarium dan Fasilitasi Jejaring Deteksi Dini dan Cegah Dini Gangguan Keamanan, Rapat Koordinasi FKDM, Rapat Koordinasi Tim Terpadu PKS, Rapat Tim Pengawasan Orang Asing dan Bimtek Dasar Intelejen serta Rapat Forkopimda;
- Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indikator program Persentase Pembinaan Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada daerah rawan konflik. Indikator Pelaksanaan kegiatan berupa Konsolidasi GNRM dan Kader Bela Negara serta Rapat Koordinasi Forum Kemitraan Pembauran.
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Budaya dengan icon kegiatannya Desa/kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) merupakan salah satu upaya mengurangi munculnya kasus potensi konflik sosial dari pengaruh penyalahgunaan narkoba. Indikator kinerja dari Program ini adalah Persentase Desa Bersih Narkoba dengan target 86,21% realisasi 100 % sehingga capaian target sebesar 115%. Realisasi lebih tinggi dari target dikarenakan diakhir RPJMD telah terbentuk 50 Desa Bersinar sesuai target jangka menengah daerah. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pelaksanaan Rapat Tim Terpadu P4GN serta Koordinasi berupa Rapat Uji Publik Naskah Kampung Madani, Pembekalan Satgas/Mentor Fasilitator P4GN, Rapat Desa Bersinar

b. Efektifnya pola koordinasi

Yaitu koordinasi dengan Perangkat Daerah di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota serta Instansi Vertikal yang ada didaerah yang memiliki keterkaitan Fungsi, seperti:

- Satpol/PP dalam hal penegakan PERDA dan melakukan penertiban sesungguhnya akan mendapatkan perlawanan atau ada yang pro maupun kontra terhadap tindakan yang diambil dan bahkan memicu terjadinya konflik, namun karena mitra Bakesbangpoldagri terutama anggota deteksi dini dan cegah dini, FKDM, Timdu/PKS yang beranggotakan lintas sector, dll berperan dengan baik maka kehawatiran adanya gejolak dapat diminimalisir;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemdes Dukcapil, terkait dengan penyebaran penduduk seperti yang terdapat di Dompu,dan Kabupaten Sumbawa Barat, Bakesbangpoldagri berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan OPD terkait dalam rangka mengawal dan menciptakan suasana kondusif di lokasi sebaran, demikian juga dengan program Desa / Kelurahan Bersinar yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se- NTB, dll;
- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK), POLDA NTB, POLRES Kab/Kota, Kelurahan/Desa terkait dengan pelaksanaan program Desa/Kelurahan Bersinar.

Beberapa sebab yang memicu terjadinya konflik sosial di Provinsi NTB diantaranya:

- Kurangnya intensitas dialog dengan masyarakat terutama pada daerah-daerah yang telah dipetakan rawan terjadinya konflik (Kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten maupun Provinsi).
- Kurang adanya sosok panutan atau ketokohan yang disegani (Kharismatik).
- Menurunnya pemahaman nilai sosial, budaya dan saling tenggang rasa dalam menjaga kerukunan hidup antara warga sebagai dampak arus kemajuan teknologi dan globalisasi
- Terbukanya ruang untuk menyampaikan pendapat dimanfaatkan secara berlebihan oleh masyarakat, tanpa mempertimbangkan dengan matang dampak yang akan timbul
- Kondisi ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk karena pandemi covid-19, sehingga mudah terprovokasi ke hal-hal yang tidak membangun.
- Keterbukaan Teknologi informasi yang tidak cermat dimanfaatkan oleh masyarakat,terutama di media sosial dengan berita-berita Hoaks sehingga mempengaruhi emosi masyarakat
- Topografi dan jangkauan Wilayah kerja yang luas tidak diimbangi dengan sarana dan sumber daya yang memadai.

Terhadap konflik sosial yang terjadi di Provinsi NTB yang dipicu dari hal-hal seperti yang disampaikan di atas, telah dilakukan upaya-upaya :

- Koordinasi dengan seluruh Jejaring Kabupaten/Kota untuk segera siaga di lokasi kejadian dan melakukan tindakan pencegahan agar tidak terulang lagi kejadian yang sama, serta tidak berkembang kearah yang lebih besar lagi
- Melakukan tindakan penanganan terhadap kasus yang terjadi serta dampak yang ditimbulkan

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya keamanan dan kenyamanan Lingkungan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.368.605.412 (Lima milyar tiga ratus Enam puluh Delapan juta Enam Ratus Lima ribu Empat Ratus Dua Belas rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 5.287.253.159 (Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua atus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Dengan kata lain, capaian kinerja keuangan sebesar 98 % yang terealisasi dan terdapat 2 % anggaran yang tersisa. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi sebesar 2 % untuk pencapaian sasaran meningkatnya kemanan dan kenyamanan Lingkungan

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung sasaran Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Deteksi dini & Cegah Dini potensi konflik sosial	100%	97,53%	97,53%

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan indikator Persentase keberhasilan Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi Konflik Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

CAPAIAN KINERJA												
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024												
PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA		: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI										
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/ Kegiatan	ANGGARAN				Penanggung Jawab
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		Rp.	Realisasi (Rp)	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
1	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Persentase keberhasilan deteksi dini & cegah dini potensi konflik	%	3	3	100.00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3,910,560,000	3,887,965,840	99.42	100	BADAN KESBANGPOL DAGRI NTB
		Kasus	3	3.37	112.33		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	250,000,000	250,000,000	100.00	100	
							Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1,322,555,000.00	1,322,210,840.00	99.97	100	

					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	55,000	55,000	100.00	100	
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2,337,950,000.00	2,315,700,000.00	99.05	100	
					PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	750,305,412	711,826,419	94.87	100	BADAN KESBANGPOLDAGRI NTB
		%	0.1	0.12	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	60,009,800.00	57,729,800.00	96.20	100	
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	-	-	#DIV/0!	100	
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	-	-	#DIV/0!	100	
					Pelaksanaan Tugas Paskibraka	690,295,612.00	654,096,619.00	94.76	100	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	707,740,000	687,460,900	99.54	100	BADAN KESBANGPOLDAGRI NTB
Persentase Penanganan Potensi Konflik	%	5.11	5.37	105.09						

					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	542,600,000.00	540,100,000.00	99.54	100		
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	136,035,000.00	122,080,900.00	89.74	100		
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	29,105,000.00	25,280,000.00	86.86	100		
JUMLAH SASARAN 1						5,368,605,412	5,287,253,159	98.48	100		
2	Meningkatya Kesadaran Politik Masyarakat	%	68.67	66.06	96.20	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1,767,314,000	1,721,929,000	97.43	100	BADAN KESBANGPOLDAGRI NTB
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1,643,879,000.00	1,599,819,000.00	97.32	100		
	Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Politik				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	67,050,000.00	66,680,000.00	99.45	100		

				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	56,385,000.00	55,430,000.00	98.31	100		
		%	0.75	0.79	105.33	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	160,007,024,455	158,545,528,010	99.09	100
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	159,078,832,455.00	157,730,993,373.00	99.15	100	
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	748,012,000.00	662,055,807.00	88.51	100	
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	180,180,000.00	152,478,830.00	84.63	100	
JUMLAH SASARAN 2						161,774,338,455	160,267,457,010	99.07	100	
JUMLAH SASARAN 1 + 2						167,142,943,867	165,554,710,169	99.05	100	

SASARAN II

MENINGKATNYA MASYARAKAT SADAR POLITIK

Meningkatnya kesadaran masyarakat politik merupakan indikator sasaran Pemerintah Daerah, tetapi karena Bakesbangpoldagri merupakan satu-satunya Perangkat Daerah pengampuh, maka sasaran beserta indikator sasaran tersebut diturunkan langsung Perangkat Daerah pengampuh dalam hal ini yaitu Bakesbangpoldagri.

Penetapan Sasaran Meningkatnya masyarakat sadar politik merupakan satu harapan besar yang ingin dicapai Bakesbangpoldagri untuk menunjukkan bahwa masyarakat NTB semakin sadar pentingnya berperan serta membangun daerah dalam bentuk berserikat melalui wadah organisasi. Oleh karena itu untuk mengetahui seberapa besar kesadaran masyarakat NTB memanfaatkan atau menggunakan fasilitas / organisasi-organisasi yang ada untuk menyalurkan/ menyampaikan gagasan/ aspirasinya dalam rangka berkontribusi membangun bangsa atau wilayahnya akan terlihat pada pencapaian indikator dari sasaran tersebut yaitu **Persentase Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah** dengan formula penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{masyarakat yang mendapat pendidikan politik}}{\sum \text{masyarakat yang memiliki hak pilih pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah}} \times 100\%$$

\sum masyarakat yang memiliki hak pilih pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Meningkatnya kesadaran politik masyarakat

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Capaian (%)	Persentase Tingkat Capaian
Persentase Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah	0,75	0,83	110

Persentase Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah

Persentase Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah salah satu indikator yang menggambarkan tentang kepedulian atau ikut sertanya masyarakat membantu Pemerintah mengawal pembangunan di semua sector melalui wadah organisasi, baik, organisasi politik, organisasi profesi, Organisasi Kepemudaan, maupun organisasi

kemasyarakatan, dll. Dari Tabel diatas dijelaskan bahwa dari target 0,75 % realisasi nya 0,83 % sehingga capaian target mencapai 110 %. Angka tersebut diperoleh berdasarkan Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik melalui sosialisasi maupun kaderisasi yang dilaksanakan oleh partai politik sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 2.637 orang dibagi dengan Jumlah DPT Wilayah dengan tingkat Partisipasi Rendah yaitu Kota Mataram sebanyak 315.549 orang.

Tabel.3.11 Data Partisipasi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

DATA JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

NO	URAIAN		RINCIAN												
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		LOMBOK BARAT	LOMBOK TENGAH	LOMBOK TIMUR	SUMBAWA	DOMPU	BIMA	SUMBAWA BARAT	LOMBOK UTARA	KOTA MATARAM	KOTA BIMA	JUMLAH AKHIR	PERSENTASE DALAM KELOMPOK	PERSENTASE DALAM DPT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	Lk	255,010	375,070	480,674	181,529	91,513	185,225	50,130	90,633	152,467	54,547	1,916,798		48.92
		Pr	262,809	397,336	504,711	186,458	92,947	191,300	52,292	92,758	163,082	57,800	2,001,493		51.08
		Jml	517,819	772,406	985,385	367,987	184,460	376,525	102,422	183,391	315,549	112,347	3,918,291	-	100.00
2	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap	Lk	218,567	298,643	343,287	147,754	77,978	151,693	44,089	77,096	125,521	46,900	1,531,528	47.12	39.09
		Pr	234,706	343,696	437,028	147,291	79,789	161,468	44,573	81,432	138,126	50,790	1,718,899	52.88	43.87
		Jml	453,273	642,339	780,315	295,045	157,767	313,161	88,662	158,528	263,647	97,690	3,250,427	100.00	82.96
3	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	Lk	594	711	768	1,447	491	759	1,114	270	1,226	783	8,163	55.63	0.21
		Pr	478	507	803	1,072	335	622	534	294	1,371	494	6,510	44.37	0.17
		Jml	1,072	1,218	1,571	2,519	826	1,381	1,648	564	2,597	1,277	14,673	100.00	0.37
4	Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Lk	2,924	4,796	6,306	2,701	3,263	2,164	1,404	599	1,880	1,018	27,055	45.46	0.69
		Pr	3,958	7,233	7,577	2,951	3,316	2,166	1,158	923	2,182	993	32,457	54.54	0.83
		Jml	6,882	12,029	13,883	5,652	6,579	4,330	2,562	1,522	4,062	2,011	59,512	100.00	1.52
5	jumlah pengguna hak pilih	Lk	222,085	304,150	350,361	151,902	81,732	154,616	46,607	77,965	128,627	48,701	1,566,746	47.13	39.99

		Pr	239,142	351,436	445,408	151,314	83,440	164,256	46,265	82,649	141,679		1,757,866	52.87	44.86
		Jml	461,227	655,586	795,769	303,216	165,172	318,872	92,872	160,614	270,306	48,701	3,324,612	100.00	84.85
6	Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT		592,225	789,364	1,006,908	376079	188,488	384,824	104,670	187,371	322,459	114,725	4,067,113		
7	Jumlah Surat Suara yang digunakan		461,227	655,586	795,769	303216	165`172	318,872	92,872	160,614	270,306	100,978	3,159,440	77.68	
8	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih (karena rusak/keliru coblos)		648	897	1,004	311	152	259	93	140	291	111	3,906	0.10	
9	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		67,350	132,881	210,135	72,552	23,164	65,693	11,705	26,617	51,862	13,636	675,595	16.61	
10	Jumlah Pemilih Disabilitas	Lk	669	608	1,559	688	647	792	222	258	340	488	6,271	42.43	0.16
		Pr	809	711	2,390	891	655	1,153	316	342	488	753	8,508	57.57	0.22
		Jml	1,478	1,319	3,949	1,579	1,302	1,945	538	600	828	1,241	14,779	100.00	0.38

$$\text{Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik} = \frac{\text{Jumlah pengguna hak pilih}}{\text{Jumlah Pemilih dalam daftar Pemilih tetap}} \times 100 = 84.85$$

HASIL PILPRES 2024

NO	URAIAN	RINCIAN
----	--------	---------

I	DATA RINCIAN PEMILIHAN SUARA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			LOMBOK BARAT	LOMBOK TENGAH	LOMBOK TIMUR	SUMBAWA	DOMPU	BIMA	SUMBAWA BARAT	LOMBOK UTARA	KOTA MATARAM	KOTA BIMA	JUMLAH AKHIR	PERSENTASE (%) DALAM KELOMPOK	PERSENTASE DALAM DPT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	H. ANIES RASYID BASWEDAN, PH.D - DR (HC). H.A. MUHAMMIN ISKANDAR	138,850	174,477	166,481	66,727	35,081	81,865	27,846	38,785	87,541	32,886	850,539	26.20			
2	H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA	277,940	430,129	535,445	206,532	120,702	218,485	56,756	100,827	145,580	62,447	2,154,843	66.37			
3	H. GANJAR PRANOWO, SH. M.I.P - Prof. Dr. H.M. MAHFUD MD.	28,944	36,608	77,519	24,032	6,314	10,828	5,943	16,103	30,995	3,820	241,106	7.43			
JUMLAH			445,734	641,214	779,445	297,291	162,097	311,178	90,545	155,715	264,116	99,153	3,246,488	100		

JUMLAH PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMILIH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	=	82.85
---	---	-------

NO	URAIAN			RINCIAN												
I	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH			LOMBOK BARAT	LOMBOK TENGAH	LOMBOK TIMUR	SUMBAWA	DOMPU	BIMA	SUMBAWA BARAT	LOMBOK UTARA	KOTA MATARAM	KOTA BIMA	JUMLAH AKHIR	PERSENTASE DALAM KELOMPOK	PERSENTASE DALAM DPT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	JUMLAH SELURUH SURAT SUARA SAH		445,734	641,214	779,445	297,291	162,097	311,178	90,545	155,715	264,116	99,153	3,246,488	97.78		
2	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		15,493	14,372	16,324	5,925	3,075	7,694	2,327	4,899	1,825	1,825	73,759	2.22		

3	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		461,227	655,586	795,769	303,216	165,172	318,872	92,872	160,614	265,941	100,978	3,320,247	100	-
---	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	-----------	-----	---

13.89 19.75 23.97 9.13 4.97 9.60 2.80 4.84 8.01 3.04

NO	URAIAN		LOMBOK	SUMBAWA	TOTAL	PERSENTASE
1	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	=	2,339,137	981,110	3,320,247	100
2	SUARA SAH	=	2,286,224	960,264	3,246,488	98
3	SUARA TIDAK SAH	=	52,913	20,846	73,759	2
4	PERSENTASE SUARA SAH		97.74	97.88	97.78	
5	PERSENTASE SUARA TIDAK SAH		2.26	2.17	2.22	

100

100

1. Partai Politik (Parpol) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)/ LSM Tahun 2024.

Parpol yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara melalui Pemilu (UU No. 31 thn 2002 tentang Parpol).

Sedangkan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang).

Tabel. 3. 12 Rekap Jumlah Pengurus Parpol yang ada di Provinsi NTB Tahun 2024

NO	PARTAI	PENGURUS PEREMPUAN	PENGURUS LAKI-LAKI	JUMLAH PENGURUS
1	Partai Keadilan Sejahtera	9	79	88
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	55	114	169
3	Partai Hati Nurani Rakyat	113	328	441
4	Partai Kebangkitan Bangsa	105	280	385
5	Partai Persatuan Pembangunan	80	203	283
6	Partai Golkar	273	572	845
7	Partai Nasional Demokrat	102	199	301
8	Partai Demokrat	790	411	1201
9	Partai Bulan Bintang	47	94	141
10	Partai Gerakan Indonesia Raya	103	215	318
11	Partai Amanat Nasional			175
12.	Partai Berkarya			34
	TOTAL			4.381

Sumber : Bakesbangpoldagri NTB

2. Kepengurusan Ormas dan Parpol.

Berdasarkan data yang dihimpun dari 12 (dua belas) Parpol dan sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas/LSM) baik yang melaporkan keberadaannya ataupun yang mendapat fasilitasi dari Bakesbangpoldagri dalam pengurusan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada Kementerian Dalam Negeri maupun yang berstatus Badan Hukum yang proses penerbitannya melalui Kementerian Hukum dan HAM diperoleh data bahwa terdapat 14.298 orang masyarakat NTB yang terlibat langsung dalam Kepengurusan Organisasi atau sebesar 0,64% dari 2,250.759 jiwa penduduk NTB usia 25 – 59 tahun . Kondisi capaian ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 0,61% atau sebanyak 18.006 orang. Hal ini dikarenakan pelaksanaan amanat Perda No. 7 tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang membatasi mobilitas dan berkumpul . sehingga kegiatan yang diharapkan dapat menggenjot atau menaikkan minat masyarakat untuk berorganisasi melalui sosialisasi dan bimbingan teknis tidak dapat dilakukan. (Data Ormas terlampir)

Beberapa Hal yang mendukung Pencapaian Indikator Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah yaitu :

a. Efektifnya Pemanfaatan Sumber Daya

secara capaian, indikator Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah melebihi target dengan capaian target 110 % merupakan capaian yang luar biasa. Dengan memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya yang terbatas baik dari sisi kuantitas maupun kualitas untuk menghasilkan kinerja yang optimal, sumber daya dimaksud melalui:

1) Saling keterkaitan dan saling mendukungnya antara indikator, baik antara indikator eselon II dengan eselon 3, demikian juga antara eselon III dengan eselon IV dibawahnya, sehingga indikator outcome Perangkat Daerah (Eselon II) terdongkrak dengan baik.

Indikator-indikator Eselon III dimaksud yaitu :

- Persentase Keterlibatan masyarakat dalam politik;
- Persentase Ormas yang aktif;

2) Saling bersinergi dan efektifnya program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang-bidang Teknis, yang walaupun dilihat dari sisi anggaran karena pandemic Covid-19 sangat minim dan tidak mendukung, tetapi karena substansi kegiatan bisa saling mengisi satu sama lain maka capaian outcome dari masing-masing program tidak berpengaruh secara signifikan dengan keterbatasan capaian output.

Beberapa Program dan kegiatan yang dimaksud yaitu :

- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan indikator Persentase Keterlibatan masyarakat dalam politik.

- Pelaksanaan Kegiatannya berupa hibah kepada lembaga dan partai politik peserta Pemilihan Umum, Koordinasi berupa Bimtek Bantuan keuangan Parpol, Sosialisasi Pendidikan Politik, dan Rapat Koordinasi bersama Kesbanpoldagri kab/kota se NTB;
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator nya Persentase Ormas yang Aktif. Pelaksanaan Kebijakan berupa hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Koordinasi berupa Rapat Koordinasi pengawasan Ormas dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Efektifnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi sehingga dapat mendekripsi tentang aktivitas dan keberadaan Ormas,
 - c. Dukungan Ormas/LSM sebagai mitra binaan Bakesbangpoldagri yang membantu mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui keikutsertaan bergabung dan berserikat dalam wadah organisasi.
 - d. Dukungan Organisasi politik seperti Parpol sebagai mitra Bakesbangpoldagri yang merupakan organisasi dengan partisipan yang besar dan berpengaruh.
 - e. Efektifnya Fungsi Koordinasi
 - Efektifnya pelaksanaan Koordinasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
 - Efektivnya pelaksanaan fungsi koordinasi melalui pembinaan secara langsung kepada masing-masing Ormas/LSM ataupun berkoordinasi langsung dengan pengurus=pengurus Parpol, dll.

Beberapa alternative lain lain yang telah dilakukan oleh Bakesbangpoldagri untuk meningkatkan indikator persentase keterlibatan masyarakat dalam politik adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan spirit/dorongan kepada setiap Ormas/LSM yang mengajukan permohonan mendaftarkan Lembagadiri ke Kementerian Dalam Negeri untuk senantiasa menjadi inspirasi bagi yang lain
- b) Mengimbau kepada Ormas/LSM yang mendapat bantuan hibah dari pemerintah untuk senantiasa aktif bersosialisasi ke masyarakat

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya Meningkatnya masyarakat sadar politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 161.774.338.455 (Seratus Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh puluh Empat juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat ratus Lima Puluh lima rupiah)) dan terealisasi sebesar Rp. 160.267.457.010,- (Seratus Enam Puluh Miliar Dua ratus Enam Puluth Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sepuluh Rupiah).

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung sasaran meningkatnya Meningkatnya masyarakat sadar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya masyarakat sadar politik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya masyarakat sadar politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah	99 %	99 %	0,1 %

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Renstra, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target ($>100\%$) yaitu Persentase Keberhasilan Deteksi Dini & Cegah Dini Potensi Konflik Sosial dengan target 100 % dan realisasi 100 % dan capaian target 100 % dan Persentase masyarakat yang mendapat Pendidikan Politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah dengan target 0,75 % dan realisasi 0,83 % dengan capaian target 110 %.
2. Rata-rata capaian indikator kinerja 2 (Dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 sebesar 105 %, dengan kata lain capaian indikator kinerja dikategorikan **sangat baik** ($\geq 85\%$).
3. Anggaran program yang menunjang pencapaian 2 (Dua) sasaran strategis dan 2 (Dua) indikator kinerja adalah sebesar Rp. **174.992.246.483**, direalisasikan sebesar **Rp. 173.037.820.936** (98 %) dengan realisasi fisik 100%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (Dua) sasaran strategis terdapat sisa anggaran 2 % atau secara absolute sebesar Rp. 1.954.425.547,-.
4. Kasus konflik sosial di Provinsi NTB bertambah 2 kasus dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 terdapat 6 (enam) kasus konflik sosial yang terjadi
5. Jumlah kasus potensi konflik tahun 2024 di NTB masih tinggi dan didominasi oleh kasus criminal dan unjuk rasa

4.2. Saran

1. Peningkatan peran dan pemberdayaan forum-forum yang menjadi mitra Bakesbangpoldagri sangat urgent untuk dilakukan guna ketepatan dan kecepatan pengambilan kebijakan, serta deteksi dini dan cegah dini terhadap isu-isu yang menjadi potensi konflik di kalangan masyarakat.
2. Koordinasi yang intensif seluruh stakeholder dan pembinaan serta mediasi kepada warga kampung yang berkonflik agar tetap intensif dilakukan serta didukung dengan pendanaan yang memadai.
3. Duplikasi lokus Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (Desa Bersinar) supaya lebih ditingkatkan lagi baik dari sisi jumlah Desa/kelurahan maupun substansi pendekatannya dan keberlanjutannya. Program

Desa/kel Bersinar ini penting disamping menyelamatkan generasi bangsa juga berkontribusi menekan konflik sosial dari sisi kriminal.

4. Peningkatan Idiologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di kalangan masyarakat supaya lebih ditingkatkan lagi, baik volume maupun sasarannya, agar dapat mengedukasi masyarakat supaya tidak mudah terpapar paham-paham yang bertentangan dengan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Edukasi masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam politik melalui wadah organisasi sangat penting dilakukan secara berkelanjutan.
6. Pemantapan sosialisasi hidup berdemokrasi dan penggunaan hak pilih supaya tetap dilakukan dan lebih intensif lagi.

KEPALA BADAN BAKESBANGPOLDAGRIDAGRI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



RUSLAN ABDUL GANI, SH, MH.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19651231 199303 1 135